

**DERAP KAMPUS...****Hak Politik Disabilitas Tak Difasilitasi**

JOGJA--Keterlibatan masyarakat, termasuk kaum disabilitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi sangat penting. Namun partisipasi politik kaum difabel di beberapa tempat di Indonesia masih tergolong rendah. "Kepekaan masyarakat umum terhadap hak-hak penyandang disabilitas menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pemilu," ujar Dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Tunjung Sulaksono MSI di kampus setempat, Sabtu (28/5).

Padahal untuk memahami masalah kaum difabel tidak bisa dilepaskan dari perspektif, bahkan ideologi. Sebab pemahaman ideologi yang sering dipakai di Indonesia seperti penyandang cacat, difabel, berkebutuhan khusus, penyandang masalah kesejahteraan sosial, akan mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap difabel. Termasuknya dalam dominan partisipasi politik.

Menurut data partisipasi kaum difabel, Tunjung menyebutkan partisipasi politik kaum difabel di beberapa tempat di Indonesia masih tergolong rendah. Tunjung mencontohkan tingkat partisipasi difabel di Solo hanya menunjukkan angka 38,25 persen pada Pilkada 2015. Jika dihimpun dari salah satu surat kabar Solo, hanya 415 warga difabel yang menggunakan hak pilih dari total 1.085 difabel yang tercatat di daftar pemilih tetap (DPT).

"Sosialisasi yang belum menyeluruh di akar rumput inilah yang dinilai menjadi problem utama rendahnya tingkat partisipasi difabel," tandasnya.

Tunjung menambahkan, masih banyak hal yang belum tersentuh untuk meningkatkan kualitas pemilu maupun partisipasi politik difabel secara umum. Partisipasi tidak boleh hanya berhenti sampai pemilu, dan perlu adanya dorongan kelompok difabel untuk terlibat menggunakan hak-hak politiknya. "Data difabel menjadi sangat penting untuk ditindaklanjuti. Ranah-ranah partisipasi lain masih sangat terbuka bagi partisipasi kaum difabel, karena sejatinya belum banyak public policy yang sensitif terhadap problem difabel," papar Tunjung.

Sementara Sasana Integrasi dan Advokasi Disabilitas, Ishak Ilham mengatakan bahwa persyaratan undang-undang pemilu masih mencantumkan sehat jasmani dan rohani bagi peserta pemilu. "Dengan mencantumkan persyaratan pemilu yang sehat jasmani dan rohani, tentu akan merugikan para difabel, karena bagi kaum difabel bukan kategori tidak sehat," ungkapnya.

Di satu sisi, Ishak melanjutkan perilaku terhadap kaum difabel masih diabaikan. Kondisi ini dilihat dari KPU, Bawaslu, dan jajarannya masih bersikap pasif untuk membuka akses partisipasi pemilih difabel, sehingga masih terjadi pembiaran adanya difabel yang belum terdaftar. "Seharusnya jajaran KPU menyediakan layanan untuk mempermudah akses bagi para disabilitas. Serta menyediakan panduan etika disabilitas untuk menghindari penghinaan baik sengaja maupun tidak disengaja," harapnya. (ptu)